

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

## Reformasi Radikal Konstitusi Negara Rusia

Nur Rohim Yunus\*

Rusia merupakan sebuah negara besar yang mengalami perubahan sistem ketatanegaraan yang unik. Sebelum tahun 1917 ia merupakan sebuah kekaisaran dipimpin seorang Tsar, namun akhirnya berubah dalam revolusi dipimpin Lenin menjadi sebuah Konfederasi Uni Soviet Sosialis Rusia yang berhaluan Komunisme. Namun akhirnya Konfederasi Uni Soviet mengalami kemunduran dan keruntuhan, khususnya pada saat pergulingan kekuasaan Mikhail Gorbachev oleh Gennady Yanayev. Sehingga pada masa Presiden Boris Yeltsin, Uni Soviet bubar dan berubah menjadi Federasi Rusia.

Pada tahun 1993 dibentuklah Konstitusi baru sebagai perubahan bentuk negara Rusia menjadi negara Federasi. Tepatnya tanggal 12 Desember 1993 hasil suara perubahan dinyatakan bulat dan disahkan dalam Keputusan Presiden Rusia tertanggal 15 Oktober 1993 No. 1633. Suara perubahan itu merupakan suara dari pemegang suara populer dalam rancangan Konstitusi Federasi Rusia atau dikenal dengan istilah "The popular vote" dan bukan melalui referendum. Hal ini dilakukan guna menghindari kekacauan stabilitas negara. Padahal seharusnya dasar perubahannya harus mengacu pada peraturan undang-undang tentang Referendum dari RSFSR yang menyatakan bahwa Konstitusi



hanya dapat diubah dengan suara mayoritas dari para pemilih negara, tetapi hal ini tidak dilakukan. Akhirnya Konstitusi Federasi Rusia pada tahun 1993 mulai berlaku setelah melalui publikasi dalam "Rusia koran" pada tanggal 25 Desember 1993.

Isi dari konstitusi terbaru dari Federasi Rusia terdiri dari pembukaan dan dua bagian. Pembukaan menyatakan bahwa rakyat Rusia menerima konstitusi, dijamin nilai-nilai demokratis dan humanis, ditentukan dengan tempat Rusia sebagai dunia modern. Bagian pertama terdiri dari 9 bab dan terdiri dari 137 artikel yang mengabadikan dasar sistem politik, sosial, hukum, ekonomi dan sosial di Federasi Rusia, hak-hak fundamental dan

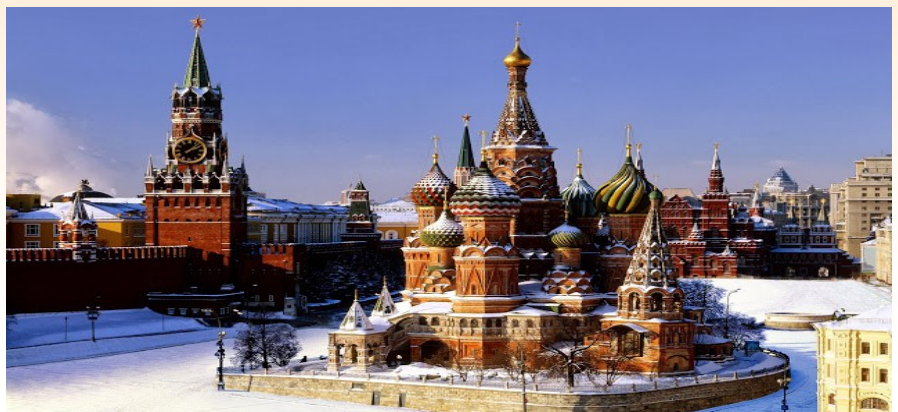
kebebasan, struktur federal Federasi Rusia, status otoritas publik, serta prosedur untuk meninjau kembali konstitusi dan membuat perubahan di dalamnya. Bagian kedua mendefinisikan ketentuan final dan transisi dan merupakan dasar dari kontinuitas dan stabilitas norma-norma konstitusional dan hukum.

Mukadimah dari Konstitusi Federasi Rusia yang disahkan tanggal 12 Desember 1993 menyatakan sebagai berikut: (The Constitution of the Russian Federation, 1993)

We, the multinational people of the Russian Federation, united by a common fate on our land, establishing human rights and freedoms, civic peace and accord, preserving the historically established state unity, proceeding

from the universally recognized principles of equality and self-determination of peoples, revering the memory of ancestors who have conveyed to us the love for the Fatherland, belief in the good and justice, reviving the sovereign statehood of Russia and asserting the firmness of its democratic basic, striving to ensure the well-being and prosperity of Russia, proceeding from the responsibility for our Fatherland before the present and future generations, recognizing ourselves as part of the world community, adopt the Constitution of The Russian Federation.

Mukadimah konstitusi ini ingin menegaskan bahwa konstitusi baru ini merupakan kesepakatan rakyat Rusia yang terdiri dari multi-etnis bangsa, tetapi dipersatukan oleh nasib yang sama di tanah Rusia. Selain adanya penegasan akan hak asasi manusia dan kebebasan, perdamaian sipil dan kesepakatan, memelihara kesatuan bersejarah negara, melanjutkan prinsip-prinsip umum yang diakui, kesetaraan dan penentuan nasib sendiri dari masyarakat, menghormati sejarah nenek moyang, mencintai dan menghormati tanah air, meyakini keadilan dan menghidupkan kembali kedaulatan Rusia, berjuang untuk mengamankan kesejahteraan dan kemakmuran Rusia, melanjutkan rasa tanggung jawab tanah air untuk generasi sekarang dan mendatang, dan menyadari diri sebagai bagian dari masyarakat dunia.



Mukadimah atau pembukaan konstitusi ini merupakan cerminan dari dokumen formal ketatanegaraan Rusia. Siapa rakyat Rusia sejatinya dan apa yang diinginkan, serta bagaimana mereka berjuang mendirikan dan mempertahankan negara ini. Hal ini merupakan suatu kelaziman yang harus ada dalam suatu konstitusi sebagaimana pernyataan Abu Tamrin dalam Jurnal Cita Hukum bahwa “Konstitusi/Undang-undang Dasar 1945 merupakan dokumen formal yang merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau” (Tamrin, 2015: 93).

Inti pokok perubahan dalam konstitusi tersebut yaitu; Bagian Pertama; Bab 1. Dasar-dasar tatanan konstitusional (Pasal 1-16), Bab 2. Hak dan kebebasan manusia dan warga negara (Pasal 17-64), Bab 3. Struktur Federal (pasal 65-79), Bab 4. Presiden Federasi Rusia (Pasal 80-93), Bab 5. Majelis Federal (pasal 94-109), Bab 6. Pemerintah Federasi Rusia (Pasal 110-117), Bab 7. Kekuasaan Kehakiman (Pasal 118-129), Bab 8. Lokal

pemerintahan sendiri (Pasal 130-133), Bab 9. Amandemen konstitusi dan revisi Konstitusi (pasal 134-137), dan Bagian Kedua. Final dan ketentuan peralihan.

Isi pokok perubahan ini telah memuat tentang pembatasan kekuasaan dalam negara. Artinya perubahan ini sudah sesuai dengan teori konstitusi suatu negara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bagir Manan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara (Arto, 2001: 10).

Dari perubahan konstitusi tersebut, maka Rusia dari tahun 1993 mengalami perubahan sistem ketatanegaraan baru atau perubahan yang sangat radikal, dari negara yang mengedepankan paham komunisme berubah menjadi negara yang berpaham demokrasi. Sehingga dominasi partai komunis di negara Rusia bukanlah satu-satu penentu kebijakan

negara, tetapi ada beberapa partai lain yang juga turut memberikan kontribusi ketatanegaraan. Selain itu, negara Rusia menjadi negara federasi yang menjadi salah satu pewaris konfederasi Soviet. Sedang negara-negara lain yang dulunya bagian dari konfederasi uni-soviet, menjadi negara sendiri yang mandiri.[]

#### Referensi Acuan:

\*Penulis merupakan Sekjen Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus mahasiswa Program Ph.D Kazan Federal University (KFU) Rusia.

Arto, A. Mukti. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Tamrin, Abu. “Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Cita Hukum, Volume 3 Nomor 1 Juni (2015).

The Constitution of the Russian Federation, 1993

**‘Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamillah.